

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya penambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*); pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu kondisi dimana terjadi peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) dari suatu negara atau daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan meningkat jika presentase kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) dalam suatu tahun / periode lebih besar daripada presentase periode sebelumnya. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. (Anonim, 2019:1)

Pertumbuhan ekonomi hingga kini masih digunakan sebagai indikator kemajuan perekonomian secara agregat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan dalam produksi barang maupun jasa dalam suatu perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi ini merupakan salah satu indikator penting di dalam melakukan suatu analisis pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat pada Produk Domestik Bruto (PDRB),

yaitu jumlah seluruh nilai produk barang dan jasa sebagai hasil kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi disatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun dikurangi dengan seluruh biaya antara yang dikeluarkan dalam proses produksi tanpa memperhatikan apakah factor-faktor produksinya (tanah, tenaga, modal, dll) berasal dari atau dimiliki oleh penduduk dalam wilayah tersebut. (Nasution, 2015:2)

Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan produksi suatu negara atau kenaikan pendapatan perkapita suatu negara. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi erat kaitanya dengan produk domestik bruto (PDB) atau produk domestik regional bruto (PRDB) jika dalam lingkup daerah (Suliswanto, 2010:359). Pada dasarnya pembangunan ekonomi ditujukan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi. Dari tujuan tersebut tidak semua daerah, khususnya daerah sedang berkembang mampu mencapai tujuan tersebut secara bersamaan. Ketidakmampuan tersebut disebabkan oleh terbatasnya sumberdaya pembangunan yang dimiliki. Jadi permasalahan yang dihadapi oleh sebagian besar Daerah Sedang Berkembang adalah pilihan untuk mengejar pertumbuhan setinggi-tingginya dengan menunda pemerataan, atau mengutamakan pemerataan dengan pertumbuhan yang tidak terlalu tinggi. Namun faktanya menunjukkan bahwa kebanyakan daerah Sedang Berkembang memilih tujuan yang pertama yaitu mengejar pertumbuhan dengan menunda pemerataan. Hal ini disebabkan karena apabila pertumbuhan ekonomi sudah tinggi, maka akan lebih mudah untuk

mencapai tujuan pemerataan, atau bahkan akan dapat terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi dengan sendirinya. (Nuraini, 2010:109)

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu daerah dalam suatu periode tertentu, dimana PDRB di definisikan sebagai jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia nampak selalu memberikan prediksi optimistik yang yang meningkat dari tahun ke tahun. (Suliswanto, 2010:357)

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan salah satu unsur utama dalam pembangunan ekonomi regional, meskipun proses pembangunan bukan hanya ditentukan oleh aspek ekonomi saja. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sampai saat ini merupakan target utama pembangunan dalam rencana pembangunan wilayah. Melalui pertumbuhan ekonomi daerah yang cukup tinggi diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan secara bertahap.

Diberlakukannya UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, maka setiap daerah diberikan kewenangan atau kebebasan dalam mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku atau yang disebut dengan desentralisasi. Peran pemerintah sebagai penggerak pembangunan sangat strategis dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi di daerahnya.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, dimana pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat hasil dari pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. (Husniatuz, 2018:241)

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur. Selama lima tahun terakhir (2014-2018) struktur perekonomian Kabupaten Ponorogo secara umum didominasi oleh 7 (tujuh) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Konstruksi; Jasa Pendidikan; Industri Pengolahan, Informasi dan Komunikasi; serta Administrasi, Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. (Anonim, 2018:94)

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Ponorogo pada tahun 2018 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu mencapai 28,04% (angka ini perlahan menurun dari 31,60% di tahun 2014). Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 17,84% (naik dari 15,91% di tahun 2014), disusul oleh lapangan usaha konstruksi sebesar 9,84% (naik dari 9,45% di tahun 2014). Berikutnya lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 8,48% (naik dari 8,46% di tahun 2014); lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 7,15% (naik dari 6,79% di tahun 2014); lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 6,87% (cenderung stabil, di tahun 2014 juga berperan 6,87%); dan lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan

Jaminan Sosial Wajib sebesar 5,36% (meningkat tipis dibanding tahun 2014 yang sebesar 5,35%) (Anonim, 2018:94)

Kabupaten Ponorogo menjadi salah satu daerah penyangga pangan di Jawa Timur. Luas lahan sawah pada tahun 2018 masih tetap 34.801 Ha yang terdiri dari sawah irigasi seluas 32.781 Ha dan sawah non irigasi seluas 2.020 Ha (Anonim, 2018:11). Kabupaten Ponorogo merupakan daerah yang memiliki corak agraris sehingga tidak heran jika peranan sektor pertanian sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor pertanian di Kabupaten Ponorogo mencakup sub-kategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian, sub-kategori Kehutanan dan Penebangan, dan sub-kategori Perikanan. Sub-kategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian meliputi Tanaman Pangan, Tanaman Holtikultura, Tanaman Perkebunan, Peternakan, dan Jasa Pertanian. (Anonim, 2018:124)

Kontribusi lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB pada tahun 2018 mencapai 28,04%. Subkategori usaha Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian merupakan kontributor terbesar dalam menciptakan nilai tambah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, mencapai 95,07%. Subkategori tersebut juga masih dirinci lagi dan Tanaman Pangan merupakan kontributor terbesar terhadap pembentukan nilai tambah subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian yaitu sebesar 57,10%, disusul Peternakan sebesar 18,32%, Tanaman Holtikultura sebesar 17,32%, Tanaman Perkebunan sebesar 6,04% serta Jasa Pertanian dan Perburuan sebesar 1,22%.

Sementara itu, kontribusi kedua subkategori lainnya terhadap lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masing-masing kurang dari 5%. Kontribusi subkategori Kehutanan dan Penebangan Kayu sebesar 2,98% dan subkategori Perikanan lebih rendah yaitu 1,95%. (Anonim, 2018:105)

Hal diatas secara garis besar dapat diartikan bahwa sebagian masyarakat Kabupaten Ponorogo masih menggantungkan hidupnya pada sector pertanian, oleh karena itu sudah sewajarnya jika Pemerintah Kabupaten Ponorogo dapat memberi perhatian lebih untuk kemajuan sector ini, sehingga sector pertanian dapat menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi yang nantinya mampu meningkatkan pendapatan para petani dan mampu mengentaskan kemiskinan.

Dari latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini akan menganalisis lebih lanjut mengenai **“Analisis Sektor Pertanian Pada Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Ponorogo”**

1.2 Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian analisis peran sektor pertanian pada pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ponorogo yaitu:

1. Apakah sektor pertanian merupakan sektor basis dalam perekonomian di wilayah Kabupaten Ponorogo?
2. Komoditas pertanian apa saja yang menjadi unggulan di Kabupaten Ponorogo?

3. Apakah terjadi pergeseran struktural pada sektor pertanian di Kabupaten Ponorogo?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah sektor pertanian merupakan sektor basis dalam perekonomian di wilayah Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui komoditas pertanian apa saja yang menjadi unggulan di Kabupaten Ponorogo.
3. Untuk mengetahui pergeseran struktural sektor pertanian di Kabupaten Ponorogo

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang peran sektor pertanian pada pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ponorogo
2. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan pertimbangan apabila berminat melaksanakan penelitian lebih lanjut maupun penelitian yang sejenis.